

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan *good governance* dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur serta evaluasi secara berkala sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab.

Menunjuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*Strategic Planning*) yang ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pariwisata diwajibkan pula untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 yang dibebankan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

- 1.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi NTT (RIPPARPROV NTT);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah;
13. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah: "sebagai media pertanggungjawaban/akuntabilitas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu satu tahun sekali, serta sebagai

gambaran tingkat capaian kinerja instansi pemerintah (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur) dalam upaya pencapaian tujuan dan kemajuan (*progress*) dalam menjalankan misinya”.

Sedangkan yang menjadi tujuannya adalah :

- 1.Mendukung terwujudnya Pemerintahan yang baik, bersih dan penuh tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan;
- 2.Sebagai media informasi bagi Pemerintah Provinsi NTT dan masyarakat Nusa Tenggara Timur mengenai kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT selama satu tahun anggaran;
- 3.Sebagai bahan evaluasi dan introspeksi terhadap keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang.

### **C.GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI TAHUN 2020**

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan :

- 1.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2019, tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2.Peraturan Gubernur Nomor 21 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan instansi teknis pemerintah yang melaksanakan kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam bidang pariwisata, dengan tugas pokoknya adalah **“mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”**.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a.Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b.Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d.Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, sarana dan prasarana perkantoran, serta mobilitas yang handal dan didukung pula dengan financial yang signifikan.

Dengan adanya dukungan seperti di atas, diharapkan akan dapat menjawab pertanyaan masyarakat mengenai nilai pelayanan yang diperoleh dari aparaturn Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah merupakan unsur pelaksana kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Pariwisata dan Ekonimi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 21 Jabatan Struktural, yakni : Kepala Dinas, Sekretaris Dinas yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang dengan masing-masing bidang membawahi 3 Seksi. (Bagan Struktur Organisasi terlampir).

Tabel. I.1.  
Komposisi Pegawai berdasarkan Gol/Ruang  
Keadaan 31 Desember 2020

NO	GOL/RUANG	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1	Gol. IV/e	-	-	-	
	Gol. IV/d	1	-	1	
	Gol. IV/c	-	-	0	
	Gol. IV/b	2	-	2	
	Gol. IV/a	3	2	5	
	Jumlah Gol IV	6	2	8	9.76%
2	Gol. III/d	10	9	19	
	Gol. III/c	7	6	13	
	Gol. III/b	9	6	15	
	Gol. III/a	3	5	8	
	Jumlah Gol. III	29	26	55	67,07%
3	Gol. II/d	1	4	5	
	Gol. II/c	3	1	4	
	Gol. II/b	7	-	7	
	Gol. II/a	1	-	1	
	Jumlah Gol. II	12	5	17	20,73%
4	Gol. I/d	2	-	2	
	Gol. I/c	0	-	0	
	Gol. I/b	-	-	0	
	Gol. I/a	-	-	0	

NO	GOL/RUANG	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
	Jumlah Gol. I	2	0	2	2,43%
	<b>TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>82</b>	<b>100%</b>

Dari tampilan tabel. I.1 di atas terlihat bahwa komposisi PNS Pria lebih banyak (49 org = 59,75%) bila dibandingkan dengan PNS Wanita (33 org = 40,24%).

PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT dikelompokan berdasarkan Agama yang dianutnya seperti terlihat pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel I.2.  
Komposisi PNS berdasarkan Agama  
Keadaan 31 Desember 2020

NO	AGAMA	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	Protestan	27	19	46	56,09 %
2.	Katholik	20	10	30	36,58 %
3.	Islam	1	2	3	3,65 %
4.	Hindu	1	2	3	3,65 %
5.	Budha	-	-	0	0
	<b>T O T A L</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>82</b>	<b>100</b>

Tabel I.3.  
Komposisi PNS berdasarkan Jabatan Struktural  
Keadaan 31 Desember 2020

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH JABATAN	JABATAN TERISI			KET
			L	P	JLH	
1.	Eselon II/a	1	1	-	1	
2.	Eselon III/a	5	5	-	5	
3.	Eselon IV/a	15	7	8	15	
4.	Pejabat Fungsional	1	-	1	1	
	<b>T O T A L</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	

Tabel I.4.  
 Komposisi PNS pada Sekretariat / Bidang  
 Keadaan 31 Desember 2020

NO	SUBDIN/BAGIAN	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	Sekretariat	17	8	25	30,48%
2.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	14	4	18	21,95%
3.	Bidang Pengembangan Promosi Pariwisata	8	7	15	18,29%
4.	Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5	8	13	15,85%
5.	Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	5	6	11	13,41%
	<b>T O T A L</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>82</b>	<b>100 %</b>

Tabel I.5.  
 Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan  
 Keadaan 31 Desember 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	S-3	-	-	0	0
2.	S-2	9	4	13	15,85%
3.	S-1/D-IV	19	15	34	41,46%
4.	Diploma/Sarjana Muda	4	9	13	15,85%
5.	SLTA	13	5	18	21,96%
6.	SLTP	3	-	3	3,66%
7.	SD	1	-	1	1,22%
	<b>T O T A L</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>82</b>	<b>100 %</b>

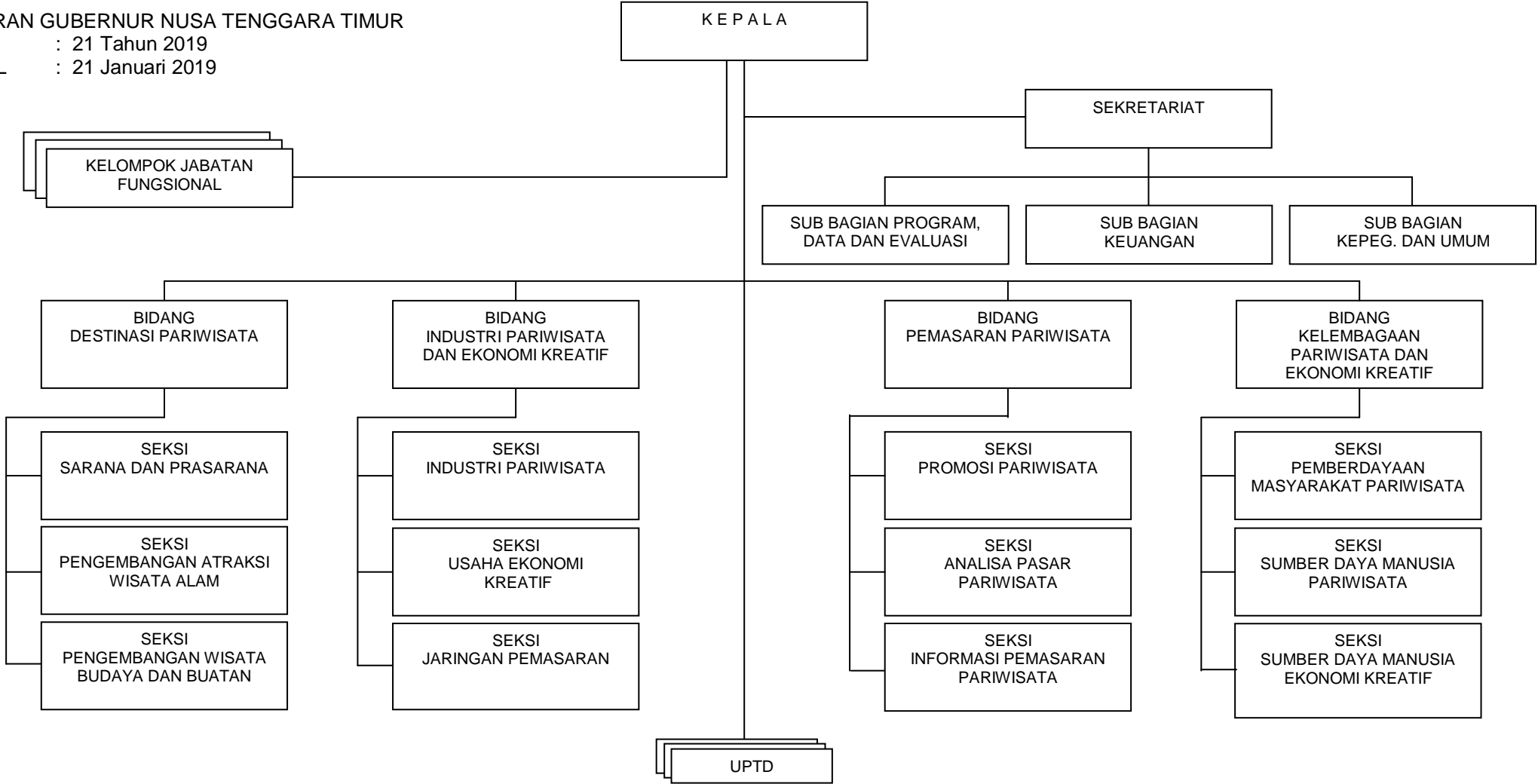
Selain Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat pegawai honorer/tenaga kontrak yang berjumlah 33 orang, dengan rincian dapat dilihat pada Tabel I.6. berikut:

Tabel. I.6.  
Komposisi Tenaga Kontrak  
Keadaan 31 Desember 2020

No	Jabatan Tenaga Kontrak	L	P	Jumlah	Ket
1	Sopir	1	-	1	3,03%
2	<i>Cleaning Service</i>	5	7	12	36,36%
3	TK. Administrasi Umum	2	3	5	15,15%
4	TK. Gua Monyet	4	1	5	15,15%
5	TK. Pantai Lasiana	4	2	6	18,18%
6	TK. Pengamanan Kantor	4	-	4	12,12%
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>100</b>

Gambar. I.1.  
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT  
Keadaan 31 Desember 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 21 Tahun 2019  
TANGGAL : 21 Januari 2019





## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A.RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Kinerja pelayanan SKPD yang dapat digambarkan adalah dilihat dari seberapa besar capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA periode 2018 – 2023, yang digambarkan secara kualitatif. Penggambaran secara kualitatif ini tentunya belum dapat menunjukkan besaran perkembangan pembangunan kepariwisataan secara angka ‘mutlak’ tetapi dapat memberi informasi bahwa pembangunan sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Adapun capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. *Tujuan : Meningkatkan kualitas DTW, koordinasi, jaringan kerjasama informasi dan komunikasi antar sektor (pemerintah dan swasta), dicapai melalui sasaran :*

a. Tersedianya DTW yang siap pakai dengan indikator:

a.1. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai pedoman pembangunan suatu kawasan antara lain : RIPPARDA;

b. Kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengembangan kepariwisataan:

b.1. Terjalinnnya koordinasi antar sektor, antara lain dengan sektor perhubungan berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas, sektor perindag berkaitan dengan pembinaan industri pendukung kepariwisataan (tenun ikat), sektor koperasi berkaitan dengan pembinaan usaha kecil, sektor kimpraswil berkaitan dengan pembangunan sarana prasarana menuju DTW;

b.2. Koordinasi kemitraan ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi berbagai mitra kepariwisataan antara lain PHRI, HPI, GAHAWISRI, ASITA, FORMASI, ASIDEWI, Forum, maskapai penerbangan dan media masa (cetak dan elektronik), dll;

b.3. Koordinasi antar wilayah ditunjukkan dengan dukungan dan partisipasi Kabupaten/Kota dalam berbagai aktivitas pembangunan kepariwisataan, forum Rakor yang telah menghasilkan berbagai kesepakatan strategis.

c. Kerjasama yang sinergis antar seniman, budayawan, swasta dan masyarakat untuk pemanfaatan seni budaya secara optimal:

c.1. Melibatkan pelaku seni (sanggar, perorangan) untuk turut serta dalam berbagai event baik di dalam maupun di luar negeri;

c.2. Melaksanakan kegiatan pentas seni budaya lewat jambore pariwisata, dan Festival lainnya di Daerah;

d. Meningkatnya *length of stay (LOS)* lama tinggal dan pengeluaran wisatawan.

e. Tersedianya Data Base Kepariwisata:

Data yang tersedia adalah data mentah berupa jumlah potensi kepariwisataan yang ada pada masing-masing kabupaten/kota termasuk jumlah kunjungan, yang diproduksi setiap tahunnya. Data ini mesti ditingkatkan lagi penyediaannya sebagai bahan analisis dan penyusunan perencanaan pembangunan kepariwisataan ke depan.

2. Tujuan : Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi Kreatif :

a. Terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan :

Hal ini dapat terlihat dari berbagai dukungan masyarakat baik dalam pelaksanaan event pertunjukan, maupun dalam dukungan pembangunan fisik kepariwisataan. Di samping itu masyarakat juga turut mengambil bagian dalam memanfaatkan peluang dari berbagai aktivitas kepariwisataan yang ada dengan menjalankan usaha kreatif;

b. Terciptanya kreativitas masyarakat dalam pembudayaan Sapta Pesona sehingga mendorong terciptanya lingkungan yang aman, tertib, bersih, sehat, indah, ramah tamah dan kenangan.

Sampai dengan saat ini terdapat 234 Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagai ujung tombak pelaksanaan Sapta Pesona terutama di lingkungan sekitar objek wisata. (*Update Database Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2020*).

3. Tujuan : Meningkatkan profesionalisme pelayanan usaha pariwisata :

a. Terwujudnya pelayanan usaha pariwisata yang profesional:

Untuk menapai hal ini, maka telah dilaksanakan kegiatan antara lain : Temu Mitra Usaha Pariwisata (*Coffee Morning*), Pelatihan Pramuwisata, Festival Makanan Khas dan Souvenir Khas;

b. Tersedianya standar dan prosedur pelayanan publik:

Hal ini belum dilaksanakan secara maksimal berkaitan dengan masih *rancu* pembagian kewenangan pemerintahan antar wilayah. Diharapkan dengan berlakunya PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, akan lebih memperjelas urusan bidang kepariwisataan yang menjadi tanggung jawab masing-masing tingkatan wilayah;

c. Penataan kelembagaan yang sinergis dan pelayanan administrasi kelembagaan yang efektif dan efisien:

Hal ini ditunjukkan dengan penyelesaian berbagai administrasi kedinasan yang tidak mengalami kendala berarti dalam periode ini.

Kebijakan pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 merupakan Tahun Kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

### 1. Visi

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalankan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 periode IV RPJPD 2005-2025, yang mengusung visi :

**“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.**

RPJMD 2018-2023 juga menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun yang akan datang sesuai visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu :

**“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.**

Makna NTT Bangkit :

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan ‘bangkit’ melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia.

BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik, sekaligus sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi serta bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa dimana tidak melakukan sesuatu yang berarti serta masa ‘tidur panjang’ untuk berjuang melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis

serta saling menghargai dan gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan yang dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sayangnya, setelah Indonesia merdeka selama 75 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

## 2.Misi

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 dan khusus sektor pariwisata tertuang dalam Misi ke 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

**Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)**

Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai sumberdaya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor Pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *Tourism Estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

## 3.Tujuan dan Sasaran

### 3.1.Tujuan

- a.Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta pelayanan pariwisata yang berkualitas;
- b.Meningkatkan partisipasi masyarakat di objek wisata;
- c.Meningkatkan rasa kecintaan masyarakat terhadap Seni dan Budaya Lokal Daerah;
- d.Meningkatkan minat dan bakat dalam mengembangkan kreatifitas dalam Pemanfaatan Potensi Lokal.

### 3.2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai mengacu pada tujuan sebagaimana tersebut di atas, disusun dengan memperhatikan prinsip *Spesific (unik)*, *Measurable (dapat diukur)*, *Achievable (dapat dicapai)*, *Result Oriented (Orientasi pada hasil)*, *Time Bond/Time Related (jangka waktu) (SMART)*, adalah sebagai berikut:

1. Untuk tujuan *Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta pelayanan pariwisata yang berkualitas*, maka sasaran dari tujuan ini diarahkan kepada:
  - a) Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara;
  - b) Sarana prasarana pelabuhan pariwisata.
2. Untuk tujuan *Meningkatkan partisipasi masyarakat di objek wisata* maka sasaran dari tujuan ini diarahkan kepada:
  - a) Fasilitas Pengembangan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri;
  - b) Fasilitas dan Pengembangan Kapasitas dan SDM Pariwisata.
3. Untuk tujuan *Meningkatkan Rasa Kecintaan Masyarakat terhadap Seni dan Budaya Lokal Daerah* maka sasaran dari tujuan ini diarahkan kepada:  
Menumbuhkan Rasa Memiliki terhadap seni dan Budaya Lokal Daerah.
4. Untuk tujuan *Meningkatkan Minat dan bakat dalam mengembangkan Kreatifitas dalam Pemanfaatan Potensi Lokal* maka sasaran dari tujuan ini diarahkan kepada:
  - a) Peningkatan dan Pemanfaatan Produktifitas masyarakat pelaku wisata;
  - b) Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam berkreasi.

## B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2020

Strategi dan arah kebijakan merupakan satu kesatuan dari rangkaian kerangka kerja logis mulai dari pendekatan **top down** (visi dan misi gubernur) dan pendekatan **bottom up** (isu strategis) dimana telah dijelaskan pada sebelumnya keterkaitan antara misi pertama dan ke lima gubernur terpilih yang terkait dengan urusan dan kewenangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kedalam tujuan dan sasaran renstra.

### 1. STRATEGI

Strategi yang adalah inti dari proses perencanaan strategis merupakan cara untuk merealisasikan rumusan tujuan secara nyata, yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan aktor pembangunan lainnya seperti kalangan swasta dan masyarakat. Strategi juga mencerminkan bagaimana SKPD memanfaatkan kekuatannya atau memperkecil kelemahannya dalam menangkap peluang dan/atau menghindari ancaman dalam pelayanan publik yang dilaksanakan.

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan di atas, maka strategi pencapaiannya adalah :

- a. Perlindungan, penataan dan pengembangan daya tarik wisata;
- b. Pengkajian dan penetapan daya tarik wisata sebagai destinasi unggulan;
- c. Mendorong tumbuhnya berbagai atraksi;
- d. Peningkatan kualitas dan jangkauan pemasaran pariwisata terutama ke pasar potensial;
- e. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana promosi;
- f. Penyusunan segmentasi pasar wisatawan;
- g. Peningkatan Profesional Pelayanan Kepariwisata;
- h. Peningkatan koordinasi lintas sektor, kemitraan dan lintas wilayah dalam pengembangan kepariwisataan.

## 2. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan pernyataan dan komitmen yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan rumusan strategi untuk pencapaian tujuan. Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan di atas maka kebijakan pencapaiannya adalah :

- a. Mendorong terlaksananya kegiatan pentas seni dan budaya sebagai bentuk menjadikan budaya sebagai modal pengembangan pariwisata;
- b. Melakukan inventarisasi potensi event budaya sebagai atraksi wisata dan penetapan skala event (*core*, *major* dan *supporting*) baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kab/kota;
- c. Penataan dan penetapan kebijakan perencanaan pengembangan kepariwisataan;
- d. Melakukan inventarisasi potensi kawasan wisata untuk ditetapkan sebagai destinasi unggulan baik tingkat provinsi maupun kab/kota;
- e. Melakukan inventarisasi berbagai atraksi wisata untuk kemudian ditetapkan skala event baik *core*, *major* maupun *supporting event* baik pada tingkat kab/kota maupun tingkat provinsi;
- f. Mendorong terlaksananya berbagai atraksi wisata sebagai hiburan umum dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat;
- g. Mendorong terciptanya pelayanan administrasi dan pembinaan usaha kepariwisataan agar terciptanya iklim usaha yang kondusif;
- h. Penataan dan pengadaan model/format pembinaan bagi pelaku usaha kepariwisataan;
- i. Pelaksanaan kegiatan promosi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di samping pelaksanaan strategi promosi yang konvensional;

- j. Penataan sistem penyediaan sarana dan informasi kepariwisataan yang lebih komprehensif;
- k. Melakukan pengkajian/survey kecenderungan wisatawan sebagai acuan strategi promosi;
- l. Pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- m. Peningkatan koordinasi antar kemitraan, antar wilayah dan lintas sektor dalam upaya membangun kebudayaan dan kepariwisataan daerah;
- n. Mendorong dan memberi kesempatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan;
- o. Pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat terutama bagi masyarakat di sekitar daya tarik wisata;
- p. Mendorong terciptanya pembudayaan Sapta Pesona dan masyarakat sadar wisata;
- q. Pengembangan profesionalisme tenaga kerja sektor kepariwisataan dalam memberikan pelayanan prima bagi wisatawan;
- r. Penataan tatalaksana dan mekanisme pelayanan publik sektor kebudayaan dan pariwisata;
- s. Pengembangan kinerja organisasi dinas dalam rangka penguatan kelembagaan.

Tabel II.1.  
Target Indikator Program Dalam RPJMD

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)				2020				
				Target	Rp. (Juta)	Capaian Target	Realisasi Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Capaian Target	Realisasi Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah TIC ( <i>Tourism Information Center</i> ) di setiap kab/kota yang terintegrasi dengan Rumah NTT dan Perpustakaan Umum ramah pengunjung	Unit	0	7		1		14		1		Belum tercapai 13 unit TIC
	Jumlah obyek wisata yang memiliki digital literasi	Obyek	0	7		7		14		7		Belum tercapai 7 Objek
Program NTT Bangkit	Jumlah Pariwisata Estate	Kawasan	0	7		7		14		9		Belum tercapai 5 Kawasan
	Jumlah usaha di bidang Pariwisata yang dikelola Masyarakat	Unit	1.057	2,006		2,114		2,206		2,281		Target Terpenuhi
	Jumlah tenaga terampil bersertifikat dengan data terpilah gender	Orang	298	361		498		418		0		Belum tercapai 418 orang
	Jumlah UMKM yang berbasis ekonomi kreatif	Unit	41	50		187		55		98		Melebihi target 43 Unit



Tabel II.2.  
Rencana Kerja Tahun 2020 yang tertuang dalam PK 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Output		Outcome	Benefit	Impact
			Kondisi 2019	2020			
1	2	3	4		5	6	7
1	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah TIC ( <i>Tourism Information Centre</i> ) di setiap kab/kota yang terintegrasi dengan Rumah NTT dan Perpustakaan Umum ramah pengunjung	1 unit	14 unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB</li> <li>•Lama tinggal kunjungan wisata</li> <li>•Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara</li> <li>•Jumlah Tourism Estate dalam <i>Ring of Beauty</i></li> </ul>	Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah ( <i>prime mover</i> )	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional ( <i>Ring of Beauty</i> )
		Jumlah obyek wisata yang memiliki digital literasi	7 obyek	14 obyek			
2	Program NTT Bangkit	Jumlah Pariwisata Estate	7 kawasan	14 kawasan			
		Jumlah usaha di bidang Pariwisata yang dikelola Masyarakat	2006 Unit	2206 unit			
		Jumlah tenaga terampil bersertifikat dengan data terpilah gender	361 orang	418 orang			
		Jumlah UMKM yang berbasis ekonomi kreatif	50 Unit	55 unit			

A.APBD Provinsi NTT

Program	Anggaran	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.765.040.337
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	347.995.000
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	26.250.000
4. Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.	7.879.390.000
5. Program NTT Bangkit	Rp.	9.726.298.750
Jumlah	Rp.	19.744.974.087

B.APBN

Program	Anggaran	
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Pariwisata	Rp.	115.340.000
2. Program Pengembangan Kepariwisata	Rp.	2.190.000.000
Jumlah	Rp.	2.305.340.000

Tabel II.3.  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : “NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”			
Misi II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional ( <i>Ring of Beauty</i> )			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan: Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah ( <i>prime mover</i> )	Sasaran: Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata ( <i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i> ) dengan pola pendekatan kawasan	Strategi: 1.Penataan DTW 2.Penguatan Kapasitas SDM 3.Penguatan Industri Kreatif	Arah Kebijakan: 1.Penyediaan DTW yang representatif di Desa Wisata 2.Peningkatan Profesionalisme Pelaku Usaha Pariwisata, masyarakat dan Generasi Muda 3.Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri kreatif di DTW

C.PROGRAM DAN KEGIATAN 2020

Dari kebijakan-kebijakan tersebut pada bagian terdahulu, maka dijabarkanlah program-program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Belanja Non Urusan
- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur;

c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
2. Belanja Urusan
- a.Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

1)Pengelolaan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

2)Pengelolaan Pemasaran Pariwisata;

3)Pengembangan dan Revitalisasi Obyek Wisata Potensial.

b.Program NTT Bangkit:

1)Penyediaan Destinasi Pariwisata Estate;

2)Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Pariwisata *Ring of Beauty*,  
NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera
- LAKIP 2020 | 19

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

#### **D.DEKONSENTRASI 2020**

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2020 mengelola dana dekonsentrasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya dan Program Pengembangan Kepariwisata dengan DIPA Nomor: DIPA-040.01.3.400607/2019, tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 2.305.340.000,- dengan program kegiatan:

1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Cina;
2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Eropa;
3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Barat, Singapura, Thailand dan Indochina;
4. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Tengah, Malaysia dan Brunei;
5. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Timur, Timor Leste, Philipina dan Papua Nugini;
6. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Australia dan Asia Oceania;
7. Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga.

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

### **A.AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan sektor yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara sektor, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Pemerintah Provinsi NTT adalah, Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tahun 2018 – 2023), RKT 2020 dan Penetapan Kinerja 2020. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) / *Key Performance Indikator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

### **B.PENGUKURAN KINERJA**

#### **1.Metode Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

**Atau:**

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan sektor kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan sektor kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

## 2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$ : Sangat Baik
- $70\% \leq X < 85\%$ : Berhasil
- $55\% < X < 70\%$ : Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$ : Belum Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Misi: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)**

- a. Mengembangkan Destinasi yang berkualitas, berdaya saing, menarik dan berkelanjutan yang mampu mendorong Pembangunan Ekonomi Daerah.*
- b. Mengembangkan Promosi Pariwisata yang berkualitas dengan memanfaatkan pengakuan dunia terhadap Komodo dan Kelimutu sebagai suatu keajaiban dunia serta kampung adat Wae Rebo sebagai warisan dunia (UNESCO).*
- c. Mengembangkan Industri Kreatif sebagai penopang pertumbuhan pariwisata.*
- d. Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan di Bidang Pariwisata.*

Melalui misi ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur berniat memberikan penekanan pada :

- a. Upaya untuk mengoptimalkan potensi keberagaman Budaya dan Keindahan Alam yang memiliki keunggulan komparatif menjadi kualitatif sebagai asset wisata yang dapat “*dijual*” yang berdampak positif terhadap peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran/ pembelanjaan wisatawan, yang secara otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan masyarakat (PAD). Fokus pengembangan ini akan mendorong lahirnya berbagai atraksi wisata potensial berkaitan dengan pemanfaatan potensi bahari daerah, tanpa mengesampingkan berbagai atraksi wisata yang tidak bersentuhan dengan bahari/ kelautan.
- b. Upaya strategis dan sistematis untuk memperkenalkan potensi kebudayaan dan pariwisata daerah melalui penyediaan *software* (kebijakan pengembangan promosi, website, layanan interaktif, dll) maupun penyediaan *hardware* berupa barang promosi (cetak dan elektronik), partisipasi pada berbagai kegiatan promotif, penyelenggaraan event-event promotif, peningkatan kerjasama kelembagaan, pembangunan *Tourist Information Centre/ Pusat Informasi Pariwisata (TIC/PIP)*, study banding, pagelaran festival seni dan budaya, dan lain-lain, dengan sasaran utama peningkatan kunjungan wisatawan ke NTT
- c. Menata kompetensi SDM Pariwisata dan Industri Kreatif di Bidang Pariwisata baik aparatur swasta, pelaku dan masyarakat sehingga secara profesional dapat melakukan tugas pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan, disamping itu koordinasi dengan sektor terkait, antar mitra dan antar wilayah harus ditingkatkan.

## **C.CAPAIAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusaha, objek dan daya tarik wisata, serta usaha lainnya yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pengembangan objek dan daya tarik wisata tersebut apabila dipadukan dengan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, seperti biro perjalanan, jasa konvensi, penyediaan akomodasi dan penyediaan transportasi wisata, akan berfungsi di samping meningkatkan daya tarik bagi berkembangnya jumlah wisatawan juga mendukung pengembangan objek dan daya tarik wisata baru. Hasil yang optimal akan diperoleh apabila upaya pengembangan tersebut didukung oleh pembangunan prasarana yang memadai.

Dengan memperhatikan hal tersebut, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara terpadu antara berbagai komponen yang menentukan dan menunjang keberhasilannya, seperti objek dan daya tarik wisata, akomodasi, transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, dan industri cenderamata, serta melibatkan koperasi, swasta, dan masyarakat luas. Selain itu, sumber daya manusia yang merupakan pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan sangat penting untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Keberhasilan pengembangan kepariwisataan tersebut dapat diukur dari jumlah kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Timur dan berapa lama wisatawan berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan beberapa target dan indikator keberhasilan pembangunan kepariwisataan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada Tahun 2020, target pembangunan kepariwisataan tersebut kemudian direalisasikan melalui Penetapan Kinerja seperti yang tertera dalam tabel berikut.



Tabel III.1.  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran  
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2019	Tahun 2020		Capaian	Keterangan
				Target	Realisasi		
1.	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara yang berkunjung	Orang	1.176.772	887.815	508.181	57%	Cukup Berhasil
2.	Lama Tinggal Wisatawan di NTT	Hari	2,62	3	0,52	17%	Belum Berhasil
3.	Jumlah Tourism Estate dalam <i>Ring of Beauty</i>	Kawasan	7	14	9	64%	Cukup Berhasil
	Rata-rata					46%	Belum Berhasil

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian kinerja sasaran Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 adalah sebesar 46% atau dapat dikategorikan Belum Berhasil. Angka tingkat capaian kinerja yang jauh dibawah target yang ditetapkan tersebut bukan merupakan indikasi kegagalan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengembangkan dan mempromosikan potensi-potensi wisata daerah yang dimiliki melainkan karena adanya kejadian luar biasa (KLB) “*Pandemi Covid-19*” yang sangat berdampak pada industri pariwisata yang juga mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Timur.

Penerapan Kejadian Luar Biasa (KLB), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Perjalanan, *Work from Home (WFH)*, *Study from Home (SFH)* hingga penutupan fasilitas-fasilitas umum, tempat rekreasi dan hiburan dalam rangka meredam penyebaran virus *corona* membawa pengaruh besar pada industri pariwisata Indonesia khususnya NTT yang sedang berada di puncak popularitas sebagai destinasi super prioritas di Indonesia.

Di Tahun 2020, proses pembangunan dan pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Timur di masa pandemi tersebut diimplementasikan oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta melalui beberapa program kegiatan seperti; (1). Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan rincian kegiatan antara lain; Pengelolaan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengelolaan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan dan Revitalisasi Obyek Wisata Potensial, dan Monitoring dan Evaluasi. (2). Program NTT Bangkit, dengan rincian kegiatan antara lain; Penyediaan Destinasi Pariwisata Estate dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena terkendala pandemi *Covid-19*, dampaknya adalah jumlah wisatawan yang berkunjung hanya 57% dari target yang ditetapkan, lama tinggal wisatawan selama berkunjung juga hanya mencapai 17% (0,52 hari) dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 3 hari.

Faktanya, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki lebih dari 1.378 destinasi wisata dan merupakan provinsi dengan destinasi unggulan terbanyak dan menjadi destinasi super prioritas di Indonesia. Selain itu juga, NTT menjadi pilihan utama wisata dunia pada 2020 berdasarkan hasil survey Majalah Internasional *Lonely Planet*. Selaras dengan potensi-potensi unggulan ini, kunjungan wisatawan ke NTT dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan tren positif. Selama tahun 2013-2019 jumlah wisatawan terus meningkat, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pada tahun 2013, terdapat 397.543 wisatawan yang berkunjung ke NTT. Jumlah tersebut konstan mengalami kenaikan tiap tahun hingga mencapai 1.176.772 wisatawan pada 2019. Dengan kata lain jumlah wisatawan tahun 2019 naik 296% dibanding tahun 2013. Prospeknya, di Tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan ke NTT akan lebih banyak dibandingkan dengan Tahun 2019. Namun, pandemi *Covid-19* memang berdampak cukup besar pada arus kunjungan wisatawan ke NTT. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kunjungan wisatawan ke NTT di Tahun 2020 yang menurun drastis yaitu sebanyak 508.181 orang.

Tantangan industri pariwisata saat ini adalah bagaimana cara meningkatkan kembali jumlah wisatawan di tengah pandemi sehingga dapat membantu keadaan ekonomi negara. Data CSIS menyebutkan bahwa proyeksi ekonomi secara umum di Indonesia apabila *Covid-19* tidak dapat tertangani secara maksimal akan berkisar pada 0 - 1,99 %. Namun, apabila masih dapat tertangani pun akan berada di kisaran 4 - 4,99 % dan masih di bawah target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah yaitu 5,3%.

Beberapa sektor penunjang pariwisata yang perlu mendapat perhatian khusus adalah sektor akomodasi (hotel dan penginapan), sektor penyediaan makanan dan minuman (restoran dan rumah makan), penyediaan souvenir dan belanja, sektor transportasi dan sektor hiburan. Lima sektor tersebut merupakan sektor yang paling dibutuhkan oleh wisatawan dan paling besar persentasenya terhadap pengeluaran wisatawan selama berwisata.

Pemerintah Pusat dan Daerah terus berupaya untuk memulihkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi dan hal ini dilakukan melalui beberapa strategi salah satunya adalah membuat kampanye aktivasi transisi *new normal* untuk mengajak wisatawan domestik berwisata di dalam negeri dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap destinasi pariwisata Nusa Tenggara Timur dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE)* selama masa pandemi *Covid-19*.

Reaktivasi dan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif difokuskan pada adaptasi kebiasaan baru atau *new normal* dengan menekankan pada tiga aspek yakni inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Inovasi yang akan diciptakan dalam penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah menciptakan *big data digital* yang berisi potensi-potensi dari berbagai daerah mulai dari bidang kuliner, *fashion*, kesenian, infrastruktur dan lain sebagainya. Tujuannya agar dapat dipetakan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di setiap daerah, serta dilakukan penguatan pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Adaptasi merupakan salah satu cara untuk berkegiatan di tengah pandemi korona (*Covid-19*). Saat pandemi maupun pasca-*Covid-19*, wisatawan akan lebih memperhatikan tingkat keselamatan saat melakukan kegiatan wisata. Menerapkan protokol *CHSE* (*Clealiness, Health, Safety, and Environmental Sustainability*), modifikasi cara kerja dengan implementasi yang minim sentuhan atau *touchless*, perbaikan sanitasi sesuai protokol kesehatan, pemeriksaan dan sertifikasi kesehatan bagi pekerja sektor pariwisata, akomodasi, transportasi dan makanan minuman bagi keamanan dan kesehatan pengunjung di setiap destinasi wisata adalah cara untuk beradaptasi pasca-*Covid-19* dan perlahan menggerakkan kembali kegiatan wisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dan yang penting adalah Kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan atau *share responsibility* diantara pelaku bisnis, *stakeholders*, *shareholders* dan pemerintah untuk bertahan dan keluar dari jeratan pandemi ini.

### D.ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2020 mendapatkan anggaran APBD Murni sebesar Rp. 55.850.728.000, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.077.382.000 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 47.773.346.000.

Dikarenakan adanya Pandemi *Covid-19*, maka terdapat revisi anggaran APBD menjadi sebesar Rp. 27.612.132.087, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.867.158.000 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 19.744.974.087, dengan realisasi dapat dilihat dalam tabel III.2.

Tabel III.2.  
Alokasi dan Realisasi Anggaran 2020

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	Persentasi
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.808.022.500	1.765.040.337	1.685.073.067	95,47%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	341.995.000	347.995.000	338.854.034	97,37%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26.250.000	26.250.000	26.246.000	99,98%
4.	Program Pengembangan	23.227.858.500	7.879.390.000	7.403.357.840	93,96%

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	Persentasi
	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
5.	Program NTT Bangkit	22.369.220.000	9.726.298.750	8.521.626.410	87,61%
	<b>Jumlah</b>	<b>47.773.346.000</b>	<b>19.744.974.087</b>	<b>17.975.157.351</b>	<b>91,04%</b>

Berikut rincian capaian Program/Kegiatan Tahun 2020:

**APBD**

**1)Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan capaian kegiatan :**

**a.Pengelolaan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Alokasi dana : Rp. 4,097,524,000,- dan Realisasi : Rp. 4,017,876,400,- atau 98.06%

- Festival Seni Equador;
- Belanja hibah barang jasa kepada masyarakat berupa dukungan peralatan pembuatan produk lokal di 7 Lokasi;
- Kajian teknis proses perizinan pengelolaan destinasi super premium TN. Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

**b.Pengelolaan Pemasaran Pariwisata**

Alokasi dana : Rp. 1,432,989,000,- dan Realisasi : Rp. 1,036,604,440,- atau 72.34%

- Publikasi dan promosi pariwisata;
- Pengambilan Data TIC di 7 Destinasi PE;
- Lomba Pacuan Kuda di Kabupaten Kupang.

**c.Pengembangan dan Revitalisasi Obyek Wisata Potensial**

Alokasi dana : Rp. 2,348,877,000- dan Realisasi : Rp. 2,348,877,000 ,- atau 100 %

- Penyelesaian dan penataan 7 PE 2019.

**2)Program NTT Bangkit :**

**a.Penyediaan Destinasi Pariwisata Estate**

Alokasi dana : Rp. 7,971,590,000,- dan Realisasi : Rp. 7,038,468,350,- atau 99.1%

- Penataan Pariwisata Estate;
- Festival Kuliner Lokal;
- Rencana detail 7 kawasan destinasi baru;
- Kegiatan penyediaan unsur 5A pada kawasan PE;
- Monitoring dan Evaluasi Terpadu;
- Desain kawasan PE (jasa konsultasi).

## **b.Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Alokasi dana : Rp. 1,754,708,750,- dan Realisasi : Rp. 1,483,158,060,- atau 84.52%

- Program Hibah Jalan Daerah (PHJD);
- Kegiatan Penguatan Pokdarwis di Desa Konda Maloba Kab. Sumba Tengah yang diikuti oleh 30 warga setempat. Pelatihan langsung diberikan oleh narasumber Dinas Parekraf NTT dengan materi prosedur pembentukan kelembagaan, manajemen kelompok sadar wisata, *english for tourism*, sapta pesona dan pariwisata berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, tanggal 17-19 Maret 2020 dengan tujuan mendorong semangat masyarakat untuk memahami pengelolaan pariwisata yang profesional.
- Kegiatan pelatihan pelayanan usaha pariwisata dilakukan di Fatumnasi Kab. TTS 11-13 Maret 2020, Wolwal Kab. Alor 11-13 Maret 2020, Koanara Kab. Ende 11-13 Maret 2020, Lamalera B Kab. Lembata 10-12 Maret 2020, Uitiuh Tuan Kab. Kupang 01-03 Oktober 2020, Daiama Kab. Rote Ndao 13-15 Agustus 2020, Praimaditha Kab. Sumba Timur 06-08 September 2020. Setiap pelatihan diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari masyarakat setempat.
- Tata Kelola Persampahan dalam Rangka Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, selama 4 Hari. Kegiatan dimulai tanggal 5 November sampai 8 November 2020 yang bertempat di Aula Hotel Green Prundi dan menghadirkan 8 (delapan) Narasumber yaitu : Ir.Wayan Darmawa, MT (Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi dan Kreatif Provinsi NTT), Dr.Alfonsus Theodorus, MT ( Bappelitbangda Provinsi NTT), Word Wildlife Fund (WWF Indonesia), Margaretha Subekti ( KSU Sampah Komodo ), Ica Marta Muslin ( Indonesian Waste Platform) dan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Drs.Ady E. Mandala, M.Si (Kepala Bidang Kelembagaan Dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Prov.NTT) dan Joni Lie Rohi Lodo, SH ( Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT).  
Materi yang disampaikan pada kegiatan ini meliputi:
  - Kebijakan Tata Kelola Destinasi dalam mengatasi persampahan;
  - Keberlanjutan Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Manggarai Barat;
  - Kajian Master Plan Pengelolaan Sampah Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka mendukung pengembangan Pariwisata Berkelanjutan;
  - Pengelolaan sampah menuju sertifikasi CHSE Destinasi dan destinasi bebas sampah plastik pada destinasi wisata;
  - Daur Ulang sampah menjadi Industri Kreatif;

- Sistem dan penguatan kelembagaan pengelolaan sampah dan penetapan PERDES;
- Kegiatan Funtrip yang dilakukan di Desa Rangko dengan aksi bersih-bersih.
- Kegiatan Penguatan Kelompok Sadara Wisata (Pokdarwis) di 4 kabupaten yaitu Desa Nangamese kab. Ngada 24-27 November 2020, Desa Uma Uta kab. Sikka 25 November – 28 November 2020, Desa Wadumaddi kab. Sabu Raijua 25 November – 28 November 2020 dan Desa Tema Tana kab. Sumba Barat Daya 26-29 November 2020.  
Kegiatan Pokdarwis diikuti 30 peserta setiap lokasi sehingga total peserta di 4 lokasi 120 orang yang menghasilkan pembantuan Pokdarwis di desa – desa yang menjadi atau calon desa wisata. Narasumber kegiatan ini berasal dari Dinas Parekraf Provinsi NTT, unsur akademisi (Politeknik Negeri Kupang dan Unkris Kupang) dan praktisi pariwisata. Materi yang disampaikan meliputi pariwisata berbasis masyarakat, pariwisata berkelanjutan, prosedur pembentukan kelembagaan, manajemen kelompok sadar wisata dan sapta pesona. Anggaran yang digunakan sebesar Rp 280.028.000.
- Kegiatan Penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di 2 kabupaten yaitu Desa Pledo kab. Flotim 02-05 Desember 2020, dan Desa Kanebibi kab. Belu 02-05 Desember 2020.  
Kegiatan Pokdarwis diikuti 30 peserta setiap lokasi sehingga total peserta di 2 lokasi 60 orang yang menghasilkan pembantuan Pokdarwis di desa – desa yang menjadi atau calon desa wisata. Narasumber kegiatan ini berasal dari Dinas Parekraf Provinsi NTT, unsur akademisi (Politeknik Negeri Kupang dan Unkris Kupang) dan praktisi pariwisata. Materi yang disampaikan meliputi pariwisata berbasis masyarakat, pariwisata berkelanjutan, prosedur pembentukan kelembagaan, manajemen kelompok sadar wisata dan sapta pesona. Anggaran yang digunakan sebesar Rp 122.342.000.

## **APBN**

### **1)Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Pariwisata :**

a.Pengelolaan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

### **2)Program Pengembangan Kepariwisata :**

a.Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Cina;

b.Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Eropa;

c.Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Barat, Singapura, Thailand dan Indochina;

d.Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Tengah, Malaysia dan Brunei;

e.Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Timur, Timor Leste, Philipina dan Papua Nugini;

f.Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Australia dan Asia Oceania;

g.Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga.

Sisa anggaran APBN 2020 sebesar Rp 2.242.417.000 telah ditarik kembali ke Satker Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI untuk anggaran penanganan Covid-19. Hal ini sesuai surat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor B/KU.07/52/M-/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pengalihan Anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 yang ditujukan kepada semua Gubernur yang menyatakan bahwa kegiatan dekonsentrasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang sudah teralokasi pada DIPA OPD TA 2020 akan direlokasi ke Satker Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

E.AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 yang bersumber dari dana APBD Provinsi NTT dirinci menurut program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel III.3.

Realisasi Anggaran 2020

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI 31 DESEMBER 2020 (%)					
						TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp.)
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp.	(%) KEU	(%) FISIK	
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15	16	17
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,765,040,337				100.00%	100.00%	1,685,073,067.00	95.47%	95.47%	79,967,270
1	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,000,000	DAU	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	9,000,000.00	100.0%	100.0%	0
2	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248,085,000	DAU	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	216,562,759.00	87.29%	87.29	31,522,241
3	04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	37,345,700	DAU	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	33,652,511.00	90.11%	90.11%	3,693,189
5	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	320,900,000	DAU	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	304,586,000.00	94.92%	94.92%	16,314,000



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI 31 DESEMBER 2020 (%)						
						TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp.)	
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp.	(%) KEU	(%) FISIK		
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15	16	17	
6	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan	305,400,000	PAD	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	297,394,200.00	97.38%	97.38%	8,005,800
7	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	41,463,500	DAU	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	41,313,900.00	99.64%	99.64%	149,600
8	11	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	69,500,000	DAU	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	69,365,900.00	99.81%	99.81%	134,100
9	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,000,000	DAU	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	24,540,401.00	98.16%	98.16%	459,599
10	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,000,000	DAU	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	14,700,000.00	98.00%	98.00%	300,000
11	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	45,000,000	DAU	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	44,840,200.00	99.64%	99.64%	159,800
12	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	50,000,000	DAU	Luar NTT	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	45,264,600	90.53%	90.53%	4,735,400
13	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	11,000,000	DAU	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	10,977,000.00	99.79%	99.79%	23,000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI 31 DESEMBER 2020 (%)					
							TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp.)
							(%) FISIK	(%) KEU	Rp.	(%) KEU	(%) FISIK	
1	2		3	4	5	6	12	13	14	15	16	17
14	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	100,449,337	DAU	22 Kab/ kota	Dinas Parekraf Prov. NTT dan Mitra Kerja	100.00%	100.00%	96,648.000.00	96.22%	96.22%	3,801,337
15	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	365,000,000	DAU	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	361,000,000.00	98.90%	98.90%	4,000,000
16	40	Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85,940,000	DAU	Jakarta	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	81,481,200.00	94.81%	94.81%	4,458,800
17	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	35,956,800	DAU	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	33,746,396.00	93.85%	93.85%	2,210,404
18	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		347,995,000				100.00%	100.00%	338,854,034.00	97.37%	97.37%	9,140,966
1	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	84,189,000	DAU	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	76,002,000.00	90.28%	90.28%	8,187,000
2	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	87,806,000	DAU	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	87,806,000.00	100.0%	100.0%	0

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI 31 DESEMBER 2020 (%)				
							TARGET		REALISASI		
							(%) FISIK	(%) KEU	Rp.	(%) KEU	(%) FISIK
1	2		3	4	5	6	12	13	14	15	16
3	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	150,000,000	DAU	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	149,671,034.00	99.78%	99.78%
4	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12,000,000	DAU	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	11,395,000.00	94.96%	94.96%
5	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	14,000,000	DAU	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	13,980,000.00	99.86%	99.86%
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		26,250,000				100.00%	100.00%	26,246,000.00	99.98%	99.98%
1	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26,250,000	DAU	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	26,246,000.00	99.98%	99.98%
15	Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		7,879,390,000				100.00%	100.00%	7,403,357,840.00	93.96%	93.96%
1	02	Pengelolaan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,097,524,000	DAU	7 Destinasi Baru (Alor, Kab. Kupang, TTS, Ende, Sumba Timur, Rote Ndao, Lembata)	1). 7 Paket 2). 7 Lokasi 3). 14 Jenis 4). 1 Kegiatan 5). 1 Paket	100.00%	100.00%	4,017,876,400.00	98.06%	98.06%
2	03	Pengelolaan Pemasaran Pariwisata	1,432,989,000	DAU	7 Destinasi Baru (Alor, Kab. Kupang, TTS, Ende, Sumba Timur, Rote Ndao, Lembata)	1). 1 Kegiatan, 2). 4 Kegiatan, 3). 4 Kegiatan	100.00%	100.00%	1,036,604,440.00	72.34%	72.34%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI 31 DESEMBER 2020 (%)					
						TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp.)
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp.	(%) KEU	(%) FISIK	
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15	16	17
				Lembata), DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat, Jogjakarta, 1 Negara Eropa, 1 Negara Asia							
3	05 Pengembangan dan Revitalisasi Obyek Wisata Potensial	2,348,877,000	DAU	Kota Kupang, TTS, Ende, Sumba Timur, Alor, Lembata, Kab. Kupang, Rote Ndao	1 Paket	100.00%	100.00%	2,348,877,000	100%	100%	0
16	Program NTT Bangkit	9,726,298,750				75.00%	75.00%	8,521,626,410	87.61%	87.61%	1,204,672,340
1	01 Penyediaan Destinasi Pariwisata Estate	7,971,590,000	DAK, Fisik, DAU	Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Belu, Sikka, Flores Timur, Ngada/Riung, Kota Kupang, Alor, Kab. Kupang, TTS, Lembata, Sumba Timur, Rote Ndao, Ende, Jakarta, 1 Negara Asia Pasifik	1). 1 Paket 2). 7 Lokasi 3). 1 Kegiatan 4). 7 Kegiatan	100.00%	100.00%	7,038,468,350.00	99.1%	99.1%	933,121,650

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI 31 DESEMBER 2020 (%)					
						TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp.)
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp.	(%) KEU	(%) FISIK	
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15	16	17
2	02 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,754,708,750	DAU	7 Destinasi Baru (Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Belu, Sikka, Flores Timur, Ngada) dan 7 Destinasi Baru 2019	1). 1 Kegiatan 2). 1 kegiatan 3). 1 Kegiatan	100.00%	100.00%	1,483,158,060.00	84.52%	84.52%	271,550,690
TOTAL		19,744,974,087				100.00%	100.00%	17,975,157,351	91.04%	91.04%	1,769,816,736

Tabel III.4.  
DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) FISIK REGULER / PENUGASAN / AFIRMASI  
BIDANG KEPARIWISATAAN TAHUN ANGGARAN 2020

No	Sub Bidang / Kegiatan	Perencanaam Kegiatan			Mekanisme Pelaksanaan					Realisasi				Sisa Anggaran
		Vol	Satuan	Pagu DAK Fisik (Rp)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
					Vol	( Rp Dalam Ribuan )	Volume	(Rp)		( Rp)	%	Volume	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Sub Bidang Kepariwisataan													
	A.PROGRAM NTT BANGKIT													
1.	Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata (Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) dan Perlengkapannya di kawasan Moni Ende	1	Paket	395,866,687			1 Paket	378,136,960		378,136,958	100%		100%	17,729,068
	Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata (Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) dan Perlengkapannya di kawasan Moni Ende	1	Paket	395,866,687			1 Paket	378,136,960.37		378,136,958	100%		100%	17,729,068
2.	DAK Pembangunan Atraksi (Day Tarik)			1,621,129,326				1,561,507,993		1,561,506,993				204,205,783
	Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Pembuatan Gazebo di Kawasan Moni Ende	1	Paket	95,000,000			1 Paket	95,000,000		95,000,000	100%		100%	95,000,000
	Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Pembuatan	1	Paket	266,237,500			1 Paket	253,898,000		253,897,000	100%		100%	12,340,500

No	Sub Bidang / Kegiatan	Perencanaam Kegiatan			Mekanisme Pelaksanaan					Realisasi				Sisa Anggaran
		Vol	Satuan	Pagu DAK Fisik (Rp)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
					Vol	( Rp Dalam Ribuan )	Volume	(Rp)		( Rp)	%	Volume	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jalur Pejalan Kaki (Pedistrian) di Kawasan Moni Ende													
	Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Pembuatan Pergola di Kawasan Moni Ende	2	Unit	49,583,452			2 Unit	49,583,452		49,583,452	100%		100%	49,583,452
	Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Penataan Lansekap Plasa dan Taman Bermain Anak di Kawasan Gua Monyet	1	Paket	346,803,013			1 Paket	327,500,000		327,500,000	100%		100%	19,303,013
	Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Plaza Pusat Jajanan Kuliner di Kawasan Gua Monyet	1	Paket	601,903,197			1 Paket	590,590,000		590,590,000	100%		100%	11,313,195
	Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kios Cinderamata di Kawasan Gua Monyet	1	Paket	261,602,164			1 Paket	244,936,541.04		244,936,541	100%		100%	16,665,623
				2,016,996,013				1,957,374,680		1,939,643,951	100%		100%	221,934,851

## F. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan kepariwisataan dan Industri Kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena terkendala KLB pandemi *Covid-19*. Adapun permasalahan-permasalahan/hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

### 1. Hambatan Internal:

- a. Rendahnya kualitas produk wisata;
- b. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pada objek dan daya tarik wisata;
- c. Rendahnya kualitas dan jangkauan promosi dan informasi Pariwisata;
- d. Rendahnya kualitas SDM aparatur, masyarakat dan pelaku kebudayaan dan pariwisata;
- e. Lemahnya koordinasi lintas sektor, lintas regional, lintas pelaku Pariwisata dan masyarakat;
- f. Kebijakan pembangunan;
- g. Database kepariwisataan yang tidak komprehensif sebagai akibat dari lemahnya sistem pelaporan dari Kabupaten/ Kota sebagai sumber data;
- h. Produk hukum (Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT) yang telah ada perlu segera ditindaklanjuti agar dapat menjadi suatu payung hukum yang berkekuatan tetap;
- i. Terbatasnya kemampuan finansial pemerintah sebagai akibat dari banyaknya urusan yang harus ditangani oleh pemerintah.

### 2. Hambatan Eksternal:

- a. Kurangnya apresiasi terhadap bidang Pariwisata dan Industri Kreatif pendukung pariwisata di tingkat Kabupaten/ Kota sehingga bidang ini belum dianggap sebagai sektor andalan. Hal ini nampak dari rendahnya dukungan dana yang diberikan, yang mengakibatkan banyak program dan kegiatan yang diusulkan tidak diakomodir pada APBD Kabupaten/ Kota;
- b. Rendahnya aksesibilitas ke destinasi pariwisata sehingga menimbulkan *high cost* sebagai akibat dari tersebarnya destinasi/ kawasan/ daya tarik wisata tersebut pada berbagai pulau, dan tidak tetapnya *time schedule* dari penerbangan dan pemberangkatan pesawat-pesawat komersial dan kapal-kapal perintis;
- c. Rendahnya investasi dan minat usaha di bidang Pariwisata dan Industri Kreatif pendukung pariwisata;
- d. Persaingan antar daerah tujuan wisata yang semakin kompetitif;
- e. Kondisi politik dan keamanan dalam negeri.



Partisipasi pelaku pariwisata/ masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan Pariwisata di Provinsi NTT masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena berbagai keterbatasan, baik itu keterbatasan dana maupun kemampuan dari aparat maupun pelaku pariwisata dan industri kreatif pendukung pertumbuhan pariwisata.

## **G.LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF YANG DIAMBIL**

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditemui sebagaimana telah disebut di atas, maka telah ditempuh/diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi tentang peranan Pariwisata dalam pembangunan kepada berbagai kalangan;
2. Melakukan Rapat Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata antara Dinas Pariwisata Provinsi NTT dengan institusi yang menangani bidang Pariwisata dan Industri Kreatif Bidang Pariwisata di Kabupaten/ Kota se-NTT;
3. Melakukan pembinaan kepada BPW/APW agar menyusun paket tour yang dapat menjual beberapa daya tarik wisata dan atraksi wisata dalam satu paket sehingga dapat menekan biaya transportasi;
4. Melakukan penjajakan kerjasama dengan mitra kerja Pariwisata di luar NTT untuk dapat melakukan kerjasama dengan mitranya di NTT;
5. Mengadakan Rapat Koordinasi lintas sektor baik di tingkat Provinsi maupun di dalam daerah agar mendapatkan dukungan dalam pembangunan infrastruktur dan suprastruktur dari dan ke daya tarik wisata guna mempermudah aksesibilitas, pemberian rasa aman selama berada di NTT;
6. Mengadakan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka penyediaan media promosi melalui penyediaan situs internet yang dapat diakses oleh setiap kelas wisatawan;
7. Mengadakan kerjasama dengan pihak swasta guna mendukung pelaksanaan pembangunan kepariwisataan;
8. Menyertakan aparat Dinas Pariwisata Provinsi NTT dalam berbagai Diklat teknis fungsional yang diadakan baik di dalam maupun di luar NTT;
9. Bekerjasama dengan perguruan tinggi dan pelaku Pariwisata mengadakan Diklat bagi masyarakat dan pelaku Pariwisata dan Industri Kreatif;
10. Menyelenggarakan dan mengikuti berbagai event atraksi Pariwisata dan Industri Kreatif Bidang Pariwisata di Kabupaten/ Kota maupun di luar NTT secara *offline* maupun *online* (daring);
11. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A.KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan rangkaian evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara transparan sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, membantu mengukur dan mewujudkan visi Kepala Daerah guna kesejahteraan masyarakat hingga meningkatkan pertanggungjawaban kinerja aparatur sipil negara. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja kedepan.

LAKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT pada Tahun Anggaran 2020 Nusa Tenggara Timur telah mengarah kepada sasaran-sasaran yang direncanakan. Namun pelaksanaan program dan kegiatan tersebut belum memenuhi target indikator capaian kinerja sasaran yang ditentukan untuk tahun 2020. Tingkat pencapaian kinerja sasaran Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 adalah sebesar 28% atau dapat dikategorikan Belum Berhasil. Angka tingkat capaian kinerja yang jauh dibawah target yang ditetapkan tersebut bukan merupakan indikasi kegagalan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengembangkan dan mempromosikan potensi-potensi wisata daerah yang dimiliki melainkan karena adanya kejadian luar biasa (KLB) "*Pandemi Covid-19*" yang sangat berdampak pada industri pariwisata yang juga mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Timur.

## B.SARAN

Pengembangan pariwisata di era *new normal* saat ini akan memberikan peluang bagi setiap pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk dapat mencari celah dan mendapatkan solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI menyebutkan *pivot* dan *rebound* merupakan salah satu strategi yang dapat menjadi solusi. Strategi *pivot* yaitu melihat peluang yang ada di masa pandemi, seperti di bidang kuliner, kesehatan, digital, dan lain sebagainya yang menjadi prioritas utama masyarakat saat ini.

Strategi *rebound* adalah strategi yang dilakukan dengan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan apabila pandemi telah berakhir, sehingga usaha yang dilakukan tidak berhenti dan akan terus berjalan. Pergantian tahun ke 2021 menjadi peluang besar bagi Indonesia, karena tahun ini telah ditetapkan menjadi Tahun Internasional Ekonomi Kreatif Dunia oleh PBB yang memberikan kesempatan besar bagi pelaku ekonomi kreatif Indonesia untuk memperkenalkan produknya dan ikut bersaing di dalam maupun luar negeri.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan selama tahun 2020, dan untuk dipergunakan selanjutnya.

Kupang,

2021

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

**Dr. Ir. WAYAN DARMAWA, MT**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620505 198603 1 041